

e-news letter

NOV IV 2019

PKS PARLEMEN

KREATIF SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Mulyanto, M.Eng

TUNDA! Kenaikan Tarif Listrik



PERBAIKI DATA PELANGGAN



“Sebelum Pemerintah menarik subsidi listrik kami meminta PLN menyediakan dulu data yang valid mengenai jumlah pelanggan dari golongan rumah tangga mampu (RTM) 900 VA dan golongan lainnya. Kita verifikasi data tersebut bersama-sama dengan membandingkan berbagai data yang ada. Kami ingin ada kesesuaian antara data dan fakta di lapangan. Jangan sampai ada pelanggan yang sebenarnya masih berhak mendapatkan subsidi listrik tapi digolongkan sebagai pelanggan mampu

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

KEMBANGKAN POTENSI EBT



“EBT berkaitan dengan kelistrikan dan bahan bakar. Pada kelistrikan ada (potensi) air, angin, matahari, laut, panas bumi, dan biomassa. Perlu segera dibuat program yang masif dan terstruktur untuk penguatan EBT dengan biomassa sebagai contohnya

H. ROFIK HANANTO, SE.

Anggota Komisi VII DPR RI

TUNDA KENAIKAN TARIF LISTRIK

PERHATIKAN INDONESIA TIMUR



“Ada sekolah yang yang standar nilai UNBK harus sama. Penerimaan pegawai (CPNS-red), harus sama standarnya. Tapi infrastruktur-infrastruktur dasar tidak diperhatikan, “Kami diminta untuk menyampaikan ini. Karena kami membawa amanah dari masyarakat

SAADIAH ULUPUTTY, ST.

Anggota Komisi VII DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA

PIMPINAN FRAKSI PKS SE INDONESIA

Kokoh Melayani Rakyat

Grand Sahid Jaya
Jakarta
4-5 Desember 2019



Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA
Ketua Majelis Syuro PKS

H. M. Sohibul Iman, Ph.D
Presiden PKS



Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Toriq Hidayat: Waspadai Paham Komunisme sebagai Ancaman Ideologi Bangsa

“Ancaman keamanan nasional tidak hanya yang bersifat militer, tetapi juga non-militer, salah satunya ideologi komunisme ini. Komunisme, masih menjadi ancaman bagi Pancasila karena bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang menjadi pedoman bangsa Indonesia.

KH TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (27/11) — Anggota Komisi I dari Fraksi PKS DPR RI, Toriq Hidayat, mengamini pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang menyatakan komunisme tetap masih menjadi ancaman ideologis bagi Indonesia, pada acara sosialisasi empat pilar MPR di Tasikmalaya, pada 25 November 2019.

Toriq berpendapat, bahwa ideologi dan pemikiran cenderung sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Oleh sebab itu, segenap masyarakat perlu mewaspadai bahaya laten

komunis.

“Sebagai sebuah ideologi, komunisme tetap masih menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang PSDN” ujarnya.

Menurut Toriq, Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional telah memasukkan ancaman-ancaman yang bersifat non-militer, termasuk komunisme.

“Ancaman keamanan nasional tidak hanya yang bersifat militer, tetapi juga non-

militer, salah satunya ideologi komunisme ini” tegas anggota Fraksi PKS DPR-RI ini.

Komunisme, lanjut Toriq, masih menjadi ancaman bagi Pancasila karena bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang menjadi pedoman bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menduga bahwa komunisme masih menjadi ancaman bagi Indonesia. Menhan berujar bahwasanya ideologi komunisme di Indonesia masih tetap ada, dan segenap bangsa harus meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya bahaya laten komunis.

Menurutnya, komunisme telah memberikan catatan buruk bagi Indonesia, karena telah terbukti berupaya meruntuhkan kekuasaan Republik Indonesia yang sah.





WASPADAI

Paham Komunisme Sebagai Ancaman Ideologi Bangsa



Sebagai sebuah ideologi, komunisme tetap masih menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai-mana yang tercantum dalam Undang-Undang PSDN”

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI



Website
fraksipks.id



Instagram
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI

Politikus PKS Anggap Narasi Radikalisme Pemerintah Serampangan

Ini tidak ada transparansi metodologi penanganan. Yang ada adalah omongan-omongan serampangan dari para pejabat publik ini yang nanti akan menimbulkan masalah baru

Dr. H. SUKAMTA

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (23/11) — Politikus Partai Keadilan Sejahtera Sukamta menilai pernyataan pejabat pemerintah mengenai radikalisme selama ini serampangan.

Menurut dia, pernyataan pejabat antar-instansi tidak sama, sehingga membingungkan dan membuat masalah baru.

"Ini tidak ada transparansi metodologi penanganan. Yang ada adalah omongan-omongan serampangan dari para pejabat publik ini yang nanti akan menimbulkan masalah baru," kata Sukamta dalam diskusi soal deradikalisasi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 23

November 2019.

Anggota Komisi Pertahanan DPR ini menilai pernyataan pemerintah yang tidak padu bermula dari tidak adanya definisi tunggal mengenai radikalisme.

Menurut dia, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri punya definisi masing-masing tentang radikalisme.

"Celakanya para menteri belum jelas makhluk yang dihadapi, belum jelas tugasnya, tapi sudah ngomong," ujar Sukamta.

Menurut Sukamta hal itu kemudian menimbulkan

kebingungan. Salah satu pernyataan yang membingungkan, kata dia, adalah polemik celana cingkrang yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Fachrul Razi.

Padahal, menurut dia, celana cingkrang tak ada kaitannya dengan terorisme. Anggota Fraksi PKS itu melihat celana itu justru sedang menjadi mode berpakaian.

Sukamta menyarankan urusan penanganan radikalisme sebaiknya dikembalikan ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sementara untuk penindakan kepada Detaseme



DPR: BPIP Jangan Terjebak Sosialisasi dan Indoktrinasi!

Ada banyak masalah yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia, seperti Papua, Pembentukan Prov Papua Selatan, Amandemen UUD 1945, Urgensi Pemindahan Ibukota, masa jabatan Presiden, dipilihnya stafsus Milenial. Ini akan jadi menarik kalau BPIP melakukan kajian terhadap hal ini dengan mengajak publik lalu di komparasikan dengan Ideologi Pancasila kita.

Dr. MARDANI, M.Eng.

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (26/11) — Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hari Senin (25/11/2019) mengingatkan BPIP agar Implementasi programnya jangan sampai terjebak pada pada kegiatan sosialisasi dan indoktrinasi semata.

“Hati-hati, BPIP jangan terjebak pada pola sosialisasi dan indoktrinasi programnya,” kata Mardani, di kompleks Senayan.

Ketua DPP PKS ini mengatakan seharusnya yang

terlebih dahulu BPIP lakukan adalah memperjelas dulu kelain lembaga BPIP bedanya dengan MPR apa yang selama ini sudah sering melakukan sosialisasi 4 Pilar, “Tentunya setiap lembaga harus jelas tupoksinya, jadi tidak bertabrakan program kerja dengan lembaga lain, kan paka anggaran negara juga ini lembaga,” ujar Mardani.

Ia mengusulkan sebaiknya BPIP lebih mendorong Pancasila menjadi ilmu untuk publik agar viral didiskusikan dan dibahas, “Ada banyak masalah yang saat ini dihadapi

bangsa Indonesia, seperti Papua, Pembentukan Prov Papua Selatan, Amandemen UUD 1945, Urgensi Pemindahan Ibukota, masa jabatan Presiden, dipilihnya stafsus Milenial. Ini akan jadi menarik kalau BPIP melakukan kajian terhadap hal ini dengan mengajak publik lalu di komparasikan dengan Ideologi Pancasila kita,” ujar Mardani.

Ia juga menyarankan BPIP bisa mengembangkan pancasila sebagai ilmu dengan mengaktifkan diskursus di publik seperti mengadakan sayembara dengan hadiah sebesar 1 Miliar misalnya mengenai isu-isu kekinian dengan semangat 5 butir dalam pancasila. “Tentunya ini akan lebih menarik dan publik lebih antusias, selain menjadikan BPIP jadi lembaga yang berbeda dengan yang lain,” kata Mardani.

Legislator FPKS DPR RI ini berharap besaran anggaran untuk lembaga ini harus juga dibagi dengan kinerjanya, “Saya tidak teralu percaya kalau besaran anggaran sejalan dengan kinerja, harus diilhar dari outputnya asalkan bangsa ini jadi lebih maju, why not?” pungkas Mardani.

Foto : dpr.go.id



di bidang kearsipan, masalah keotentikan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. “Tidak semua hal-hal yang di dokumentasi itu kemudian diarsipkan, lantas kriteria dokumen seperti apa yang memang harus diarsipkan,”

Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, MA

Anggota Komisi II DPR RI

Anggota Komisi II DPR RI Surahman Hidayat menyatakan, kearsipan nasional memiliki tugas yang sangat penting yaitu adalah sebagai memori kolektif bangsa, budaya bangsa, dan integritas bangsa. Dalam rapat dengan pendapat Komisi II dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), ia sempat mempertanyakan sejauh apa koordinasi dan sinergitas yang dibangun oleh ANRI dengan lembaga-lembaga lain terkait seperti Perpustakaan Nasional ataupun Pusat Sejarah TNI Angkatan Darat.

“Terhadap keselamatan dan keamanan arsip, pemakan ada kasus kecelakaan arsip dalam bentuk kehilangan, kerusakan, pemalsuan dari arsip. Ada

KOMISI II

dpr.go.id | Rabu 27 November 2019

f Fraksi PKS DPR RI

© fraksipksdprri

👤 @fkpsdprri

🌐 fraksi.pks.id



Arsip Nasional Bertugas Sebagai Memori Kolektif Bangsa

suara-suara yang mempertanyakan keberadaan dokumen sejarah, seperti teks proklamasi yang ditulis tangan, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang konon terdapat dua versi, lantas versi yang diarsipkan itu yang mana. Atau juga tentang teks Super Semar yang dikabarkan hilang. Oleh karenanya kami meminta konfirmasi kebenaran atas hal itu,” ucap Surahman di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Surahman menegaskan, di bidang kearsipan, masalah keotentikan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. “Tidak semua hal-hal yang di dokumentasi itu kemudian diarsipkan, lantas kriteria dokumen seperti apa yang memang harus diarsipkan,” tuturnya seraya meminta agar pihak ANRI memperbaiki materi paparan yang telah disampaikan dihadapan Komisi II DPR RI yang menurutnya, secara umum, antara isu dan sasaran strategis yang disampaikan oleh ANRI itu cenderung tidak logis.

“Isu strategisnya cenderung tidak bagus, tetapi sasaran strategisnya muluk. Jadi ini gap-nya terlalu lebar.

Tolong diperbaiki paparannya nanti supaya logis. Pada isu strategis dikatakan, tidak ada kedisiplinan dan kepatuhan, sementara sasaran strategisnya muluk. Hal itu parah dan kontraproduktif. Jadi gap-nya sangat jomplang,” ujarnya. ANRI sendiri merupakan lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

Sekretaris Utama ANRI, Sumrahady mengatakan, kondisi umum arsip nasional pada RPJMN tahun 2015 sampai dengan 2019, kearsipan merupakan bagian dari pembangunan bidang hukum dan aparatur, khususnya bidang aparatur. Kearsipan terkait dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien dengan arah kebijakan penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu. Kearsipan juga merupakan bagian dari pengarusutamaan tata kelaola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kapasitas birokrasi.

Adapun isu strategis



kearsipan tahun 2020-2024 diantaranya adalah tingkat kepatuhan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, dan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan yang masih rendah. Peran arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa masih kurang optimal, kualitas pelayanan kearsipan kepada publik masih rendah, sistem pemerintahan yang berbasis elektronik bidang

kearsipan juga belum optimal. “Pengelolaan arsip kementerian/lembaga yang pindah ke ibu kota negara baru menjadi salah satu isu strategis lainnya di samping masalah ketersediaan sumber daya penyelenggaraan kearsipan yang belum memadai,” papar Sumrahady. (dep/es)

Foto: dpr.go.id

**PERINGATAN HARI GURU NASIONAL****PKS Minta Lindungi Guru dari Upaya Diskriminasi**

Pada hari guru ini saya mengingatkan kembali pentingnya perlindungan hukum untuk para guru, jangan sampai mereka kena pidana lantaran proses pendidikan

untuk para guru, jangan sampai mereka kena pidana lantaran menjalankan proses pendidikan", ujar Habib Aboe.

Anggota Komisi III DPR RI ini menyatakan, begitu banyak catatan kelam perlindungan hukum untuk guru, dimana proses pendidikan berujung pada bui. Misalnya saja Darmawati guru SMAN 3 Pare Pare yang dipidana 3 bulan lantaran menyuruh shalat dengan mengibaskan mukena dan akhirnya mengenai salah satu siswa berinisial AY.

"Demikian pula Pak Mubazir, Guru sukarela SMA Negeri 2 Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang akhirnya dipenjara lantaran memotong rambut salah satu siswanya", ungkapnya.

Tak jarang juga lanjut Habib Aboe, para guru yang akhirnya dipenjara lantaran mencubit siswa, seperti yang dialami Nurmayani, seorang guru Biologi SMPN 1 Bantaeng, Sari Asih Sosiowati Guru mata pelajaran Bahasa Lampung di SDN Tiuhalak Baradatu, Kabupaten Way Kanan, ataupun Sambudi guru SMP Raden

Rahmat, Balongbendo, Sidoarjo. "Mereka semua harus berhadapan dengan meja hijau setelah menghadapi persoalan hukum akibat proses pendidikan. Seharusnya hal sedemikian tidak boleh terjadi lagi", tegasnya.

Menurut Habib Abie perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam PP Nomor 74 Tahun 2008.

"Menurut pasal 39 ayat 1 Pada PP tersebut dikatakan bahwa Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada", tutur pria berkacamata ini.

Selain itu, Habib Aboe mengatakan guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan punishment kepada siswanya tersebut.

"dalam pasal 40 PP tersebut dikatakan bahwa Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari

pemerintah", urainya.

Habib Aboe menegaskan seharusnya rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.

"Hal ini ditegaskan kembali pada pasal 41 PP yang sama, dimana dikatakan bahwa Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, Sulawesi Selatan, atau pihak lain", ungkap Habib Aboe.

Oleh karena nya

Habib Abie mengajak para penegak hukum untuk memperhatikan kaidah hukum tersebut. Jika memang ada persoalan dilapangan, aparat bisa mengedepankan untuk melakukan restorativ justice, atau penyelesaian diluar pengadilan.

"Selamat hari guru, mari berikan perlindungan hukum untuk mereka agar bisa mencerdaskan kehidupan bangsa", tutupnya.

Habib ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (25/11) — Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November menjadi perhatian anggota DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi.

Pria yang akrab disapa Habib Aboe ini menyampaikan selamat hari guru, untuk para pendidik di seluruh tanah air.

"Pada hari guru ini saya mengingatkan kembali pentingnya perlindungan hukum



PKS: OTT KPK Masih Belum Menyelesaikan Masalah

“Dalam melakukan OTT, KPK sering membuat pernyataan bahwa ini merupakan pintu masuk untuk mengungkap aktor dan peristiwa besar. Tapi nyatanya, aktor dan peristiwa besar itu tidak pernah terungkap atau bahkan tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa OTT masih belum menyelesaikan masalah tanpa masalah”

**HM. NASIR
DJAMIL, M.SI**

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (28/11) — Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/11) di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara I, DPR RI.

RDP bersama mitra kerja kali ini merupakan RDP terakhir sebelum dilantiknya pimpinan KPK baru Desember mendatang. Evaluasi kinerja KPK 2015-2019 merupakan agenda yang dibahas pada rapat tersebut.

KPK yang dipimpin oleh Agus Rahardjo, mempresentasikan sejumlah pencapaian dan kendala selama memimpin lembaga anti rasuah tersebut.

Bahan rapat setebal 51 halaman yang disajikan Agus beserta jajarannya tak luput dari kritik dan masukan Anggota Komisi III. Tak heran jika RDP kali ini memakan waktu hingga kurang lebih 7 (tujuh) jam lamanya.

Salah satu hal yang dikritisi adalah mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering dilakukan KPK.

Kritik tersebut dilontarkan Nasir Djamil, Anggota Komisi III Dapil Aceh. “Dalam melakukan OTT, KPK sering membuat

pernyataan bahwa ini merupakan pintu masuk untuk mengungkap aktor dan peristiwa besar. Tapi nyatanya, aktor dan peristiwa besar itu tidak pernah terungkap atau bahkan tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa OTT masih belum menyelesaikan masalah tanpa masalah”.

Selain itu, Nasir juga menyoroti tentang Program Revitalisasi Integritas Mentalitas Aparat (PRIMA) yang tidak optimal, korupsi di bidang SDA dan 16 (enam belas) tunggakan kasus yang belum selesai.

Rapat ditutup sekitar pukul 17.00 dan menghasilkan 4 (empat) poin kesimpulan yang pada intinya kesimpulan tersebut mendesak KPK agar menindaklanjuti rekomendasi BPK, melaporkan beberapa data kepada Komisi III, melakukan evaluasi secara menyeluruh dan dukungan Komisi III kepada KPK dalam pemberantasan korupsi.

Foto :
dpr.go.id



PKS Desak Pemerintah Serius Tangani Karhutla!

Karhutla, 99 persen disebabkan oleh faktor kelalaian manusia. Presiden agar melakukan evaluasi konkrit terhadap kebijakan, peraturan dan menteri terkait. Mengapa karhutla selalu berulang terjadi setiap tahun padahal faktor penyebab sudah diketahui

Dr. HERMANTO, SE., MM

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (27/11) – Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan tahun ini 3 kali lebih besar dibandingkan karhutla tahun 2018. Di tahun ini terdapat 600 hot spot dan 59 ring fire.

"Cakupan luas lahan karhutla sampai November ini kurang lebih 361.857 ha. Walaupun ring fire sudah mulai berkurang, akan tetapi di beberapa tempat masih terdapat potensi kebakaran terutama di lahan gambut,"

papar Hermanto.

Hermanto mendesak Pemerintah agar lebih serius dalam melakukan tindakan preventif dan kuratif mengingat pola waktu dan segmen hutan yang terbakar serta pelaku sudah dapat diidentifikasi sejak dini.

"Karhutla, 99 persen disebabkan oleh faktor kelalaian manusia. Presiden agar melakukan evaluasi konkrit terhadap kebijakan, peraturan dan menteri terkait. Mengapa karhutla selalu berulang terjadi setiap tahun

padahal faktor penyebab sudah diketahui," papar legislator dari FPKS ini.

Terhadap pelaku karhutla, lanjutnya, Hermanto meminta agar dilakukan tindakan tegas berupa pemberian sanksi administrasi dan penegakan hukum yang lebih berat.

"Tegakkan keadilan. Jangan sampai, bila pelaku karhutla adalah rakyat kecil, hukum diproses dengan cepat. Sementara bila pelakunya adalah korporasi proses hukum berjalan sangat lambat," tandasnya.

Lebih jauh, Hermanto meminta pemerintah agar menambah peralatan pemadam kebakaran, meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku pemadaman dan memperkuat koordinasi instansi pemadam kebakaran.

"Untuk itu semua perlu ada penambahan anggaran untuk pemadaman karhutla," pungkask legislator dari Dapil Sumatera Barat I ini.



Pemerintah Harus Siapkan Dana Khusus Tangani Hog Cholera di Sumut

Dengan adanya pergantian dana yang dilakukan pemerintah, maka eradikasi atau pemusnahan terhadap ternak-ternak babi yang terjangkit ataupun terinfeksi virus mematikan akan terjadi secepatnya

drh. H, SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet meminta kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian agar menyiapkan dana khusus untuk menangani wabah Hog Cholera yang menyerang ternak babi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya dana yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, penanganan wabah itu bisa segera terselesaikan dengan cepat.

"Dengan adanya pergantian dana yang dilakukan pemerintah, maka eradikasi atau pemusnahan terhadap ternak-ternak babi yang

terjangkit ataupun terinfeksi virus mematikan akan terjadi secepatnya," kata Slamet saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik dengan Pemerintah Provinsi Sumut dan mitra kerja terkait, di Medan, baru-baru ini.

Politisi PKS itu berharap, kehadiran Pemerintah menangani wabah Hog Cholera ini, membuat peternak babi yang terjangkit virus tidak harus menunggu ternak-ternaknya mati dan pada akhirnya membuangnya ke sembarang tempat. "Saya ingin memastikan langkah

pemerintah tidak hanya memberikan informasi atau imbauan, namun pemerintah hadir untuk melakukan pemusnahan dan menangani wabah secara cepat dan tuntas," tegas Slamet.

Sampai saat ini Pemprov Sumut dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah berupaya keras untuk menghentikan penyebaran wabah tersebut. Bukan itu saja, Pemprov dan Pemda juga bekerjasama dengan kepolisian dalam menghentikan pembuangan bangkai babi ke sungai, tong sampah dan tempat-tempat umum lainnya dengan cara patroli. Karena selama ini peternak yang hewannya mati, justru membuang bangkai ke sembarang tempat. (rni/sf)

Foto
dpr.go.id



100 Hari Kerja Komisaris Utama Pertamina, Jika Tak Berprestasi Mundur Saja

Jakarta, (26/11) — Ditunjuki Basuki Tjahaya Purnama atau kerap disapa Ahok sebagai komisaris utama Pertamina mendapat tanggapan dari anggota komisi VI DPR, Nevi Zuairina.

Banyak kalangan yang tidak setuju dengan keputusan penunjukan ini dengan berbagai alasan mulai dari latar belakang kasus yang dialami, track record dalam profesionalisme kerja hingga isu politik yang melatar belakangi.

Namun Politisi PKS ini menyarankan kepada pemerintah dan semua stakeholder agar memberi kesempatan kepada Ahok bekerja selama 100 hari, apakah ia berprestasi, standard saja atau malah bikin rusuh, hingga semua dapat menilai secara fair apakah yang bersangkutan dipertahankan atau diminta mundur.

Legislator Sumatera Barat II ini mengatakan, bahwa industri migas Indonesia, pada tahun delapan puluhan pernah mengalami puncak kejayaannya yang dikelola oleh perusahaan pemerintah yakni Pertamina

Sekitar dua puluh tahun setelah kemerdekaan, tepatnya sekitar tahun 1965, kebanggan Indonesia di sektor migas sangat membanggakan dengan masuknya Indonesia sejajar dengan negara pengekspor minyak dunia yang tergabung dalam wadah OPEC seperti Arab Saudi dan Qatar. Namun pada tahun 2005, Indonesia seperti mengalami pembalikan arus sejarah industri minyak bumi dari eksportir menjadi net importir yang membuat Indonesia keluar dari organisasi bergengsi OPEC.

"Kita beri kesempatan pada Ahok untuk bekerja 100 hari untuk merealisasikan visinya membangun Pertamina seperti Petronas Malaysia. Petronas ini kan tahun 1974 baru berdiri dan langsung berguru dengan kita. Namun setelah 33 tahun tepatnya tahun 2007, petronas meninggalkan posisi Indonesia ke nomor 17 dunia, sedangkan Indonesia pada posisi 30 versi Petroleum Intelligent Weekly", kutip Nevi Posisi Indonesia yang semakin lemah dari tahun ke tahun pada cadangan minyak

Kita beri kesempatan pada Ahok untuk bekerja 100 hari untuk merealisasikan visinya membangun Pertamina seperti Petronas Malaysia. Petronas ini kan tahun 1974 baru berdiri dan langsung berguru dengan kita. Namun setelah 33 tahun tepatnya tahun 2007, petronas meninggalkan posisi Indonesia ke nomor 17 dunia

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

yang dimiliki negara ini, kata Nevi, akan menjadi tantang sangat berat bagi Ahok untuk membuktikan kemampuannya dalam mewujudkan perbaikan perusahaan plat merah tersebut. Bukti yang paling nyata adalah, seberapa mampu Pertamina nantinya akan menekan angka Impor Minyak.

Pada tahun lalu, tahun 2018, Menteri ESDM menyatakan cadangan minyak nasional sudah kalah jauh di banding Malaysia dan Vietnam.

"Saya kira semua penduduk Indonesia berharap supply energi yang menunjang

kehidupan sehari-hari dapat tersedia dengan harga terjangkau. Energi terbarukan seperti Biodiesel yang digadang-gadang menjadi andalan untuk menekan angka impor minyak mesti mampu di realisasikan. Ini kesempatan tidak akan datang dua kali buat Pak Ahok untuk membuktikan kemampuan menjadi Komisaris Utama Pertamina. Ketika perubahan itu ada, masyarakat akan dapat menerima, namun bila malah semakin buruk citra Pertamina, sebaiknya langkah mundur adalah yang tepat dilakukan", tutup Nevi Zuairina.



Pemerintah Lebih Baik Kembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT)



Jakarta (29/11) — Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian ESDM Rabu, 27/11/2019, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rofik Hananto menyampaikan pentingnya Indonesia mengembangkan sistem Industri Energi Baru Terbarukan (EBT).

Menurut Rofik EBT atau Energi Baru Terbarukan sangat penting untuk menjaga kontinuitas pasokan energi yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“EBT berkaitan dengan kelistrikan dan bahan bakar. Di kelistrikan ada (potensi) air, angin, matahari, laut, panas bumi, dan biomassa. Perlu segera dibuat program yang

masif dan terstruktur untuk penguatan EBT di biomassa contohnya. Beberapa perusahaan swasta telah menggunakan cangkang sawit untuk biomassa, menjadi alternatif yang sangat bagus untuk EBT”, ungkapnya.

Menurutnya, alam Indonesia yang sangat kaya memiliki potensi besar untuk menambah rasio elektrifikasi nasional melalui EBT. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan target 23 persen EBT dalam bauran energi sebelum 2025.

Tak hanya pengembangan EBT, Rofik pun mengusulkan penggunaan EBT dalam kendaraan-kendaraan umum di Indonesia.

“Kami mohon penggunaan EBT yang terkait dengan bahan bakar gas dan listrik untuk kendaraan umum dapat segera diaplikasikan, mungkin untuk kendaraan-kendaraan umum pemerintah (dulu), sampai akhirnya untuk kendaraan pribadi pada tahun 2020. ujanya”.

Mendukung EBT mendapat perhatian serius pemerintah, Rofik Hananto menyoal perlukah Menteri ESDM memiliki Wakil Menteri ESDM. Mengingat di negara-negara maju seperti China, memiliki Menteri yang khusus menanggapi EBT, sebagai bentuk perhatian serius negara terkait EBT begtu pula di negara berkembang seperti India juga sudah memiliki Menteri EBT sendiri. Dan kita mengetahui bahwa India sangat gencar mengembangkan EBT sebagai energi masa depan yang makin hijau dan ekonomis.

Dalam kesempatan Rapat Kerja tersebut, Rofik kembali menyampaikan ketidaksesuaiannya sebagai kewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap rencana Pemerintah yang akan menaikkan Tarif Dasar Listrik pada tahun 2020.

Dia juga menanyakan

alam Indonesia yang sangat kaya memiliki potensi besar untuk menambah rasio elektrifikasi nasional melalui EBT. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan target 23 persen EBT dalam bauran energi sebelum 2025.

H. ROFIK HANANTO, SE

Anggota Komisi VII DPR RI

perkembangan proyek EBT Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT Geo Dipa Energi di Dieng, memandang penting agar PT Geo Dipa Energi dapat segera beroperasi. Apalagi ini adalah Proyek Nasional Pertama PLTP di Indonesia yang di monitor secara khusus oleh Staf Kepresidenan. Beroperasinya PT Geo Dipa Energi juga bisa menunjang kebutuhan energi di Jawa dan Bali.

Rofik Hananto juga mengajukan permintaan review proyek geothermal di Gunung Slamet, laporan secara tertulis impor migas nasional, melonggarkan aturan dari PLN terkait penggunaan energi alternatif dan usulan keterlibatan swasta dalam kebijakan perdagangan migas

di Indonesia.

Tak hanya menyoroti isu nasional, sebagai perwakilan Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah VII, Rofik juga menyampaikan perkembangan Dapilnya yang sedang mengalami kekeringan panjang sehingga mengesalkan prioritas alokasi sumur bor air untuk membantu penyelesaian permasalahan kekeringan tersebut.

“Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara mengalami kekeringan panjang dari Bulan Juni hingga November. Tolong sumur bor air untuk diprioritaskan di Dapil kami.”, tekannya.

Saadiah Minta Listrik Diperhatikan, Saat Tes Online CPNS dan UNBK

“Ada sekolah yang standar nilai UNBK harus sama. Penerimaan pegawai (CPNS-red), harus sama standarnya. Tapi infrastruktur-infrastruktur dasar tidak diperhatikan

SAADIAH ULUPUTTY, ST

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (26/11) — Menjelang tes CPNS pada akhir 2019 dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2020, listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Ketersediaan listrik yang stabil sangat penting demi suksesnya tes CPNS dan UNBK berbasis online.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan PT. PLN (Persero), Anggota Fraksi PKS

DPR RI, Saadiah Uluputty meminta PLN agar memperhatikan ketersediaan dan kestabilan listrik menjelang tes CPNS dan UNBK berbasis online.

“Ada sekolah yang standar nilai UNBK harus sama. Penerimaan pegawai (CPNS-red), harus sama standarnya. Tapi infrastruktur-infrastruktur dasar tidak diperhatikan,” kata Saadiah dalam RDP di Gedung Nusantara I, Jakarta, 25 November 2019.

Menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab Saadiah sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

“Kami diminta untuk menyampaikan ini. Karena kami membawa amanah dari masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Saadiah juga meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus terkait ketersediaan dan kestabilan listrik di wilayah Indonesia

timur.

“Ini kritik kami kepada pemerintah. Khusus untuk daerah Indonesia timur seperti Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat,” tambahnya.

Seperti diketahui bahwa kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan tes CPNS dan UNBK secara online membutuhkan kesiapan infrastruktur pendukung seperti komputer. Untuk menunjang itu, diperlukan tenaga listrik yang stabil.



PKS Minta PLN Perbaiki Data Pelanggan

Jakarta (26/11) — Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mulyanto minta kepada PLN untuk memverifikasi ulang data pelanggan, Sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR-RI dengan jajaran Direksi PLN, Senin (25/11) di Gedung Nusantara I.

Menurut Mulyanto, sampai saat ini DPR-RI tidak mendapatkan data pasti mengenai jumlah pelanggan PLN, terutama pelanggan golongan rumah tangga mampu (RTM) 900 VA yang dinilai masih layak mendapatkan subsidi listrik dari Pemerintah.

"Sebelum Pemerintah menarik subsidi listrik kami meminta PLN menyediakan dulu data yang valid mengenai jumlah pelanggan dari golongan rumah tangga mampu (RTM) 900 VA dan golongan lainnya. Kita verifikasi data tersebut bersama-sama dengan membandingkan berbagai data yang ada. Kami ingin ada kesesuaian antara data dan

fakta di lapangan. Jangan sampai ada pelanggan yang sebenarnya masih berhak mendapatkan subsidi listrik tapi digolongkan sebagai pelanggan mampu. Sebaliknya jangan ada pula ada pelanggan yang sebenarnya mampu tapi malah diberikan subsidi dari Pemerintah. Ini jelas tidak adil dan akan memberatkan beban belanja Pemerintah," ujar Mulyanto.

Menurut Mulyanto, PLN perlu mengkaji ulang dan memperbarui data tersebut secara berkala. Sebab data pelanggan ini akan menjadikan acuan bagi Pemerintah dan DPR RI dalam menetapkan besaran subsidi listrik. Data pelanggan ini juga dinilai penting untuk menghindari salah pengalokasian subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu malah disalurkan kepada kalangan yang mampu.

"Jajaran Direksi PLN harus memprioritaskan masalah data ini. Kita semua harus bekerja dan mengambil keputusan berdasarkan data yang benar



Kami ingin ada kesesuaian antara data dan fakta di lapangan. Jangan sampai ada pelanggan yang sebenarnya masih berhak mendapatkan subsidi listrik tapi digolongkan sebagai pelanggan mampu

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

dan terverifikasi. Jangan sampai kami disuguhkan data yang berbeda-beda," ujar Mulyanto.

Menanggapi permintaan tersebut Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Utama PLN Sripeni

Inten Cahyani akan menindaklanjuti secepatnya. Jajaran Direksi PLN akan berkordinasi dan melakukan pendataan ulang terkait untuk mendapatkan data pelanggan

terbaru. Pihak PLN menyanggapi akan menyerahkan data pelanggan yang sudah direvisi tersebut paling lambat 9 Desember 2019.

HNW Usulkan Solusi Waktu Tunggu atau Antrean Jama' ah Haji Tak Terlalu Lama

“Sudah seharusnya Pemerintah Indonesia memaksimalkan potensinya untuk melakukan negosiasi tersebut. Dibutuhkan keseriusan Pemerintah untuk memperjuangkan hal ini dalam rangka memperpendek masa tunggu calon jama'ah haji Indonesia

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, MA.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Bogor (25/11) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kinerja Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan

dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440H/2019M.

Namun, Hidayat secara khusus menyoroti masalah fundamental dalam pelaksanaan ibadah haji, yakni lamanya masa tunggu dan antrean calon jama'ah Haji.

Hidayat juga menyampaikan, aspirasi calon jemaah haji, untuk mengatasi masalah panjangnya daftar tunggu ini.

“Saya meminta Kementerian Agama memiliki keseriusan membuat terobosan & inovasi untuk jadi solusi mengurangi masa tunggu calon jama'ah haji yang mencapai puluhan tahun”, ungkap Hidayat Nur Wahid dalam Rapat Konsinyering Komisi VIII terkait evaluasi pelaksanaan ibadah haji di Villa DPR, Bogor (25/11).

Hidayat menjelaskan, payung hukum mengenai penentuan kuota jamaah haji tiap negara adalah KTT OKI tahun 1987, dimana ditentukan kuota jama'ah haji adalah menggunakan rasio 1/1000.

Belum lagi lanjut HNW, pada tahun 2013 hingga tahun 2016, Pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota jamaah haji sebesar 20%, terkait dengan

proyek renovasi Masjidil Haram, atau sejumlah 42.000 per tahun, bagi calon jama'ah haji Indonesia. Namun kuota yang hilang selama proses renovasi tersebut belum dikembalikan.

Padahal pembangunan dan perluasan kawasan thawaf sudah selesai. Karenanya penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menagih janji pengembalian kuota yg dipangkas tersebut.

Dengan semakin meningkatnya penduduk Indonesia, peraturan rasio 1/1000 yang ditetapkan sejak 1987 sudah tidak relevan. Meningkatnya permintaan haji dalam kondisi kuota haji yang tidak berubah menyebabkan waktu tunggu calon jamaah haji semakin panjang.

Di Sulawesi Selatan masa tunggu haji sudah mencapai 40 tahun, di Sumatera sekitar 25 tahun, di DKI Jakarta 20 tahun. Untuk itu, Hidayat menawarkan beberapa solusi.

“Agar Pemerintah Indonesia mengusulkan kembali kepada OKI muntuk membahas ulang mengenai pembagian kuota, sebab payung hukumnya ada di sana. Jika payung hukumnya bisa kita ubah, maka ini akan

membawa manfaat yang besar bagi calon jama'ah haji kita”, ujarnya.

Ada tiga opsi yang diusulkan oleh Hidayat. Opsi pertama adalah usul untuk meningkatkan rasio jama'ah haji terhadap jumlah penduduk, misalkan dari 1/1000 menjadi 1/500.

Jika itu tidak memungkinkan, maka opsi yang kedua adalah membuat kesepakatan di OKI agar Indonesia bisa mengambil kuota dari negara-negara yang kuota hajinya tidak terpakai. Contoh beberapa negara yang kuota hajinya tidak terpakai adalah negara-negara timur tengah karena berlangsungnya perang dan negara Filipina di ASEAN.

Jika kedua opsi tidak memungkinkan, maka opsi terakhir adalah Pemerintah Indonesia harus membangun komunikasi dan bekerja ma dengan

negara-negara ASEAN untuk menjalin kesepakatan agar kuota yang tidak dipakai oleh suatu negara bisa digunakan oleh jamaah haji Indonesia.

Selengkapnya kunjungi web: fraksipks.id



KASUS FIRST TRAVEL

Negara Jangan Bebani Jamaah dengan Rampas Aset

Jakarta (27/11) — Kasus First travel yang telah bergulir sejak tahun 2017 memasuki babak baru, dimana kasus ini telah merugikan jamaah dengan uang ratusan miliar yang masuk ke First Travel dan digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya

Namun uang jamaah itu bukannya dikembalikan ke jamaah, tapi malah dirampas ke negara. Hal itu terungkap dalam putusan kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang dilansir MA. Sebagai terdakwa Andika dan istrinya Anniesa. Andika dihukum 20 tahun dan Anniesa 18 tahun penjara.

Putusan tersebut diketok oleh ketua majelis Andi Samsan Nganro dengan anggota Eddy Army dan Margono. Dalam pertimbangannya MA tidak mengembalikan aset First Travel ke jamaah, tapi merampas untuk negara.

Menanggapi kasus tersebut anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis sangat menyayangkan keputusan yang dilakukan Mahkamah

Agung (MA).

"Harusnya uang sitaan First Travel itu merupakan hak penuh bagi jamaah," ungkapnya.

Iskan menambahkan dalam kasus ini, negara jangan menambah beban jamaah dengan merampas aset tersebut.

"itu kan uang jamaah, tidak ada sedikitpun kekayaan negara yang dirugikan disitu. Mestinya karena ini bukan uang negara, ini uang jamaah, dan ini murni kasus perdata asal muasalnya, dari hubungan akad untuk pemberangkatan umrah. kan kasus perdata namanya, nah, untuk itu uangnya ada, ya, mestinya

a mengemba
likan

Menurut saya ini Kelalaian kementerian agama dalam penanganan masalah umrah, harus ada sistem mitigasi dalam proses pelaksanaan bisnis umrah di Indonesia, karena ini menyangkut kenyamanan dan keamanan jamaah dalam melakukan ibadah

H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA

Anggota Komisi VIII DPR RI

uang itu kepada jamaah. Kok malah dirampas Negara? Kan aneh jadinya." tegas Iskan.

Iskan juga menyampaikan ada sekitar 63 ribu jamaah yang dirugikan, dengan total kerugian bekisar 900 miliar - 1 Triliun Rupiah.

"Harusnya kita fokus dalam menyelesaikan solusi ini, putusan MA tersebut tidak ada prinsip keadilan didalamnya. Ini kan bukan kasus tindak pidana korupsi, kalaupun dalam putusan tersebut dikatakan ini merupakan Tindak pidana pencucian Uang (TPPU), tapi tetap saja, tidak ada sepeser pun uang Negara yang dirugikan, beda halnya dengan Kasus TPPU yang lain seperti yang baru-baru ini, eks bupati Cirebon yang terkena kasus

TPPU 51 miliar lebih dengan mengalihkan hasil korupsi dalam bentuk kekayaan pribadi atas nama orang lain," ungkapnya.

Iskan menambahkan Negara dalam hal ini pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kasus ini.

"Menurut saya ini Kelalaian kementerian agama dalam penanganan masalah umrah, harus ada sistem mitigasi dalam proses pelaksanaan bisnis umrah di Indonesia, karena ini menyangkut kenyamanan dan keamanan jamaah dalam melakukan ibadah." Tutup Iskan.



**RDP KOMISI IX DENGAN
MITRA BIDANG KESEHATAN**

fraksi.pks.id | Rabu 27 November 2019 | Image Istimewa



**Rakyat Berhak Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan**

PEMERINTAH WAJIB MEMENUHINYA

termasuk hak mendapatkan layanan obat dan penggunaan alat kesehatan. Setiap orang ingin sehat. Maka pemerintah wajib segera atasi masalah kekosongan obat, obat mahal dan alat kesehatan yang masih dominan impor.

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Guru adalah pewaris Nabi Karena Membimbing Umat Manusia

Bila guru tidak profesional, Indonesia tidak akan menjadi bangsa dan negara yang maju dan beradab. Karena itu, profesionalisme guru harus menjadi prioritas yang pertama dan utama. Maka dalam proses perekrutan guru hingga ujungnya harus terkawal dengan baik

Dr. H. FAHMI ALAYDROES, MM, M.Ed

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta - Anggota Komisi X DPR Fahmi Alaydrus mengatakan guru adalah pewaris Nabi karena Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjadi guru bagi umat manusia.

"Dalam tujuan pendidikan nasional, guru adalah tulang punggung dalam membangun peradaban," kata Fahmi dalam diskusi publik yang diadakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Politisi PKS itu mengatakan guru yang profesional akan menyekong tujuan pendidikan

nasional untuk menuju Indonesia yang maju dan beradab.

Sebaliknya, bila guru tidak profesional, Indonesia tidak akan menjadi bangsa dan negara yang maju dan beradab. Karena itu, profesionalisme guru harus menjadi prioritas yang pertama dan utama.

"Maka dalam proses perekrutan guru hingga ujungnya harus terkawal dengan baik," ujarnya.

Fahmi mengatakan guru yang tidak memiliki kemampuan dan profesional hanya akan menyia-nyaikan murid-

murid yang hanya

dia ajar. Bukan satu atau dua murid, tetapi bisa jadi puluhan kan ratusan murid

bah murid "Bila diajar dan dididik dengan cara yang biasa-biasa saja, maka kelak mereka juga hanya akan menjadi orang yang biasa-biasa saja," tuturnya.

Fraksi PKS DPR

mengadakan Diskusi Publik bertajuk "Derita Guru dalam Sistem Pendidikan Indonesia" dengan pidato kunci oleh Presiden PKS Muhammad Sohibusl Imam.

Selain Fahmi, narasumber lain yang hadir dalam diskusi yang dimoderatori Ali Chudori dari Departemen Pendidikan DPP PKS itu adalah Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Abdul Mukti Bisri, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan An MQ Wisnu Aji, dan pengamat pendidikan Rocky Gerung.

DISKUSI PUBLIK

Derita Guru

dalam Sistem Pendidikan Indonesia



Presiden PKS Imbau Para Guru Tak Ikut Politik Praktis

Kriminalisasi terhadap guru yang dilakukan orang tua murid. Menurut dia, masalah tersebut harus segera diselesaikan. Sekarang banyak sekali kasus bagaimana anak dari seseorang yang biasanya punya power tertentu kemudian mengkriminalisasi guru, ini harus diselesaikan

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D

Presiden PKS

JAKARTA, - Presiden PKS Sohibul Iman menyoroti sejumlah permasalahan guru di Indonesia.

Sohibul mengatakan, dalam era reformasi ini, para guru sering ditarik dalam politik praktis terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal ini disampaikan Sohibul, dalam diskusi berjudul "Derita Guru dalam Sistem Pendidikan Indonesia" di Kompleks Parlemen, Senayan,

Jakarta, Selasa (26/11/2019).

"Pertama yaitu politisasi guru, guru ditarik ke politik praktis terutama di pilkada-pilkada, ini buruk buat masa depan guru dan masa depan kita," kata Sohibul.

Sohibul mengimbau seluruh partai politik bersikap bijak untuk tidak menarik guru dalam politik praktis dan para guru harus menahan diri.

"Dan gurunya sendiri jangan mau ditarik-tarik," ujarnya.

Selain itu, Sohibul juga menyinggung, kriminalisasi terhadap guru yang dilakukan orang tua murid. Menurut dia, masalah tersebut harus segera diselesaikan.

"Sekarang banyak sekali kasus bagaimana anak dari seseorang yang biasanya punya power tertentu kemudian mengkriminalisasi guru, ini harus diselesaikan," ucapnya.

Lebih lanjut, Sohibul mengatakan, kompetensi para guru menjadi pekerjaan rumah yang harus diperhatikan pemerintah.

"Karena kalau guru punya kompetensi yang luar biasa, kita tidak akan ragukan lagi, siswa yang hasilnya luar biasa juga," pungkasnya.



PIDATO MENDIKBUD DI HARI GURU,

DPR: Kami Tunggu Terobosan



Jakarta (26/11) — Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menayangkan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim yang belum menyentuh persoalan guru di Indonesia.

“Maksudnya bagus, agar meningkatkan awareness guru terhadap anak didik mereka, tapi persoalan guru nasional saat ini menguatirkan, kita menunggu terobosan,” ujar Fikri di Semarang, Senin (25/11).

Fikri mengomentari pidato Nadiem menyambut hari guru nasional yang bertepatan pada

25 November dan diunggah di akun resmi kemendikbud tersebut.

“Memang ada problem kurikulum di kita yang sulit diikuti guru dan juga murid, selain itu juga bongkar pasang kebijakan seolah semua pendidik dipaksa bereksperimen,” ucap politisi PKS ini.

Namun, menurut Fikri, saat ini posisi Nadiem adalah pembuat kebijakan yang tugasnya menemukan solusi atas beragam permasalahan pendidikan, khususnya terkait guru.

“Masalah guru di Indonesia mulai dari jumlah, kualitas, sampai kesejahteraan pendidik itu mestinya jadi prioritas,” imbuh Fikri yang juga mantan guru ini.

Menurut data Kemendikbud RI, secara nasional tahun ini terdapat kekurangan 746.121 guru di sekolah negeri seiring adanya 62.759 guru yang akan pensiun. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat, dimana pada tahun 2021, jumlah guru pensiun mencapai 69.757. Bahkan, dalam satu kesempatan, mantan Mendikbud Muhajir Efendi pernah meminta para guru yang sudah pensiun tahun ini agar tetap mengajar, sampai guru pengganti ada. “Kondisi ini harusnya sudah darurat pasokan guru,” imbuhnya.

Selain itu masih terdapat 1,62 juta guru yang belum tersertifikasi. Padahal sertifikasi bertujuan agar guru memiliki kualitas akademik dan kompetensi yang mumpuni. “Target dirampungkan tahun ini sulit tercapai,” kata Fikri.

Terkait kesejahteraan guru, saat ini masih terdapat 736 ribu guru honorer dengan upah hanya beberapa ratus ribu rupiah. “Jauh di bawah upah minimum provinsi dan

Saat ini posisi Nadiem adalah pembuat kebijakan yang tugasnya menemukan solusi atas beragam permasalahan pendidikan, khususnya terkait guru. Masalah guru di Indonesia mulai dari jumlah, kualitas, sampai kesejahteraan pendidik itu mestinya jadi prioritas,”

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

kabupaten kota,” sambung Fikri.

Skema pemerintah yang dijanjikan di depan DPR beberapa waktu lalu adalah diangkat menjadi CPNS bagi yang masih berusia di bawah 35 tahun. Selain itu, diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). “Namun pengangkatan P3K ini mesti melewati penganggaran di APBD masing-masing daerah, artinya paling cepat tahun depan terealisasi,” urai dia.

Upah guru di Indonesia, tambah Fikri juga termasuk yang paling rendah di Asia Tenggara. “Dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan bahkan Filipina, gaji guru kita paling rendah,” tegasnya.

Data Unesco menyebutkan

besaran gaji guru di Singapura mencapai Rp. 57 juta per bulan, di Brunei mencapai Rp. 24 juta/bulan, Malaysia Rp. 22 juta/ bulan, Thailand Rp. 12 juta/ bulan, atau Filipina yang sudah lebih menghargai guru dengan upah minimal Rp. 10 juta/bulan.

Di Indonesia saya pikir tidak cukup dengan minimal UMK atau UMP, yang layak itu gaji guru minimal dua kali UMK,” cetus dia.

Di hari guru saat ini, menurut Fikri yang mesti ditegaskan adalah kejelasan atas nasib guru. “Ada kaitan kuat dengan penganggaran, sebutkan besaran anggaran pastinya, kami siap bahas di DPR,” tutup Fikri.

Ftp : dpr.go.id

“Kalau masyarakatnya juga sadar wisata, mereka akan turut membantu menjaga kenyamanan destinasi wisata sekaligus akan mengingatkan pula para pengunjung yang serampangan

**Hj. LEDIA HANIFA
A. S.Si., M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (30/11) — Peningkatan Quality Tourism Experience diusung menjadi satu langkah prioritas Kementerian Pariwisata ke depan. Di dalamnya termasuk mengembangkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kepuasan pengalaman wisata, peningkatan SDM terampil, peningkatan diversifikasi produk dan jasa, serta adopsi teknologi.

Anggota Komisi X Ledia Hanifa Amaliah menyambut baik langkah tersebut seraya memberi satu masukan khusus terkait ekonomi hijau (green economy).

“Tren industri dunia saat ini tengah mempopulerkan konsep green economy, ekonomi hijau. Dimana suatu kegiatan industri tidak hanya memberi nilai ekonomi bagi negara melalui pertambahan devisa tetapi sekaligus juga ramah lingkungan serta berkeadilan sosial. Tentu saja

KOMISI X

Fraksi.pks.id | Sabtu 30 November 2019

Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id



Penerapan Ekonomi Hijau Perlu Disiapkan Kemenparekraf

industri pariwisata pun tidak ketinggalan, bagaimana bisa memasarkan destinasi wisata yang tidak hanya indah secara fisik tetapi juga ramah lingkungan dan memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakat sekitar,” ujar Ledia.

Disampaikan Ledia, saat melakukan kunjungan dinas bersama Pimpinan DPR ke Swiss dan Belgia pekan lalu, selain melakukan perbincangan bilateral terkait perdagangan antar negara, diskusi serius yang berlangsung terkait pula pada persoalan Peningkatan SDM khususnya di bidang pariwisata.

Dalam diskusi ini, sambung Ledia terungkap bahwa kecenderungan kebijakan wisata di dunia kini mengarah pada pengembangan destinasi wisata secara green economy. Sebab para wisatawan atau traveler masa kini, ketika mendatangi suatu destinasi tak sekedar ingin mendapatkan kepuasan pengalaman dari indahnya tempat atau bersejarahnya bangunan, tetapi sekaligus juga menuntut kepastian keamanan, kenyamanan, kebersihan, serta lingkungan yang terjaga kelestariannya.

“Indonesia sudah memiliki modal dasar dalam hal kekayaan jumlah destinasi wisata yang sangat indah dan atau bersejarah. Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasana juga terus dilakukan, didukung dengan anggaran Kementerian yang semakin meningkat. Namun peningkatan SDM bidang pariwisata dan penerapan konsep ekonomi hijau ini yang nampaknya masih memerlukan kerja keras Pak Menteri dan jajarannya,” kata anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam hal peningkatan mutu SDM Ledia mengingatkan agar setiap destinasi wisata telah memiliki SDM yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM), green oriented dan mampu menerapkannya dalam sistem tata kelola mereka.

“Urusan sampah yang tidak dikelola baik, limbah plastik yang jumlahnya terus bertambah, ekosistem alam yang rusak di berbagai destinasi wisata menjadi catatan pedih untuk Indonesia.” ujar Ledia prihatin.

Karena itulah maka peningkatan SDM yang memahami SPM dan green oriented menjadi mendesak.

Termasuk juga dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat sekitar agar mereka pun mampu berderap seiring menjaga ekosistem wisata untuk bisa membuka potensi ekonomi tapi tetap terjaga kelestariannya.

“Kalau masyarakatnya juga sadar wisata, mereka akan turut membantu menjaga kenyamanan destinasi wisata sekaligus akan mengingatkan pula para pengunjung yang serampangan. Hal ini tentu akan meringankan beban pengelola destinasi wisata dalam hal pemeliharaan kenyamanan dan kelestarian destinasi wisata. Sehingga ke depannya kita berharap tidak ada lagi catatan bagi destinasi wisata kita terkait sarpras kotor, tidak nyaman dan lingkungan yang rusak.”

Soal standar minimal pelayanan destinasi wisata disebut Ledia bisa diwujudkan dengan tersedianya tempat sampah dan toilet yang berjumlah cukup dan mudah diakses serta

a kebersihannya. Begitu pula tersedia sarana ibadah yang mudah diakses, papan informasi yang jelas dan peraturan terkait lingkungan yang tegas.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id
Foto : dpr.go.id



PKS Soroti Kesejahteraan Petani yang Tak Kunjung Membaik

"Pemerintah seharusnya lebih paham dan reponsif terkait penurunan tenaga kerja pada sektor pertanian. Beberapa Indikator kesejahteraan sektor pertanian kenyataannya cenderung belum ada perbaikan.

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, MM

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (28/11) — Sektor pertanian merupakan lahan berusaha utama dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia. Menurut data BPS, pada Agustus 2019 jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (secara luas) mencapai 34,58 juta atau sekitar 27,33% dari total tenaga kerja. Jumlah tersebut turun sekitar 1,12 juta tenaga kerja dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena jumlah tenaga kerja semakin menurun dan dapat memengaruhi ketahanan

pangan nasional.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly melihat penurunan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi fenomena yang harus diperhatikan pemerintah.

"Persoalan ini krusial, karena menentukan peranan sektor pertanian ke depan", jelas Junaidi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, (Kamis, 28/11/2019).

Penurunan tenaga kerja di sektor pertanian, lanjut Junaidi, memang sejalan dengan penurunan kontribusinya terhadap PDB. Beberapa tahun

lalu, sektor ini berkontribusi sekitar 25% terhadap PDB, sekarang sudah di bawah 20%.

"Pemerintah seharusnya lebih paham dan reponsif terkait penurunan tenaga kerja pada sektor pertanian.

Beberapa Indikator kesejahteraan sektor pertanian kenyataannya cenderung belum ada perbaikan. Misalnya NTP (Nilai Tukar Petani) yang tidak kunjung membaik, belum lagi upah buruh di sektor pertanian juga tumbuh lebih rendah dibandingkan pergerakan inflasi nasional maupun inflasi pedesaan," ungkap Junaidi.

Pada bagian lain, Junaidi menambahkan pembiayaan ke sektor pertanian juga relatif rendah, baik dari sektor perbankan maupun penanaman modal. Hal inilah yang harus diselesaikan oleh pemerintah.



Anggota DPR Apresiasi Pengembangan Ekonomi Syariah di Ponpes

Program pengembangan ini dilakukan melalui upaya mendorong ekonomi pesantren sehingga pondok pesantren yang ada dapat mandiri dan bermanfaat bagi kehidupan para santri maupun masyarakat sekitarnya.

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (23/11) — Dalam kunjungan kerja spesifik komisi XI DPR-RI ke Jawa Tengah terkait pengawasan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan pemberdayaan sector riil UMKM Bank Indonesia pada Jum'at, (22/11/2019) anggota komisi XI dari fraksi PKS Anis Byarwati mengapresiasi program strategis PSBI yaitu mendukung ekonomi syariah.

Menurut Anis program pengembangan ini dilakukan melalui upaya mendorong ekonomi pesantren sehingga pondok pesantren yang ada dapat mandiri dan bermanfaat bagi kehidupan para santri maupun masyarakat sekitarnya.

"saya memang concern dan mendukung pengembangan ekonomi syariah. Yang dipilih oleh BI ini memang satu yang sangat strategis yaitu memberdayakan pesantren," ucap Anis.

Anis kemudian meminta perwakilan dari pondok pesantren yang hadir untuk mengenalkan diri sehingga ia dapat bertanya langsung kepada mereka. Pondok pesantren penerima PSBI di Jawa Tengah sejak tahun 2015 yaitu Ponpes Roudhotul Mubtadiin, Ponpes Al-Anwar, Ponpes Futuhiyah, Ponpes Mas'udiyah, Ponpes Panbelan, dan Forum Komunikasi Ponpes.

"Diantara program yang dibiyai oleh PSBI di pondok pesantren adalah digester pengolahan limbah kotoran santri, green house, hidroponik, pembelian mesin konveksi, bordir dan jahit, pengolahan air minum, pembelian mesin grafis dan printer, pembelian mesin

pembuat pakan lele dan abon lele, pembuatan kandang kambing, pembuatan rak display trenshop dan pemajangan BI corner", ungkapnya.

Pengembangan ekonomi syariah di pondok pesantren ini menurut Anis, sangat sesuai di berikan kepada provinsi Jawa Tengah karena Jawa Tengah merupakan provinsi ketiga terbesar yang memiliki pondok pesantren setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Karena pesantren di Indonesia menurut data dari BPS tahun 2015 ada sekitar 8550 yang tentu sekarang sudah meningkat lagi. Sebanyak 15,3 persen diantaranya ada di Jawa Tengah, jadi ini sangat potensi yang sangat besar. Tidak hanya membuat masyarakat berkarakter akhlak mulia tetapi juga potensi ekonomi ada disitu. Karena santrinya juga luar biasa banyaknya. Dengan banyaknya pondok pesantren di Jawa Tengah, diharapkan dapat ikut serta membangun pertumbuhan ekonomi. Ini sangat saya apresiasi." tuturnya.

Namun demikian, doktor ekonomi Islam ini menyangkan jumlah pondok pesantren penerima PSBI yang masih



Kunsep Komisi XI Ke Jawa Tengah (Foto : dpr.go.id)

sangat sedikit. Ia kemudian menanyakan kriteria pondok pesantren penerima bantuan.

"Dari 2000 lebih pondok pesantren di Jawa Tengah, hanya 6 penerima bantuan PSBI. Apa kriterianya?". tanya Anis.

Pertanyaan tersebut, lanjut Anis juga direspon oleh koordinator pelaksana program dengan menjelaskan bahwa PSBI disosialisasikan kepada seluruh pondok pesantren dengan kriteria pondok pesantren tersebut memiliki program pemberdayaan ekonomi yang sudah dan akan berjalan, kemudian mereka mengajukan proposal.

Anis berharap agar di masa yang akan datang PSBI

dapat menyentuh pondok pesantren dengan jumlah yang lebih banyak lagi.

"Sementara ini baru 6 pesantren dari 2000 lebih, di harapkan di masa yang akan datang bisa ditingkatkan lagi jumlahnya. Terima kasih untuk BI yang telah memperhatikan ekonomi syariah dan memasukkannya sebagai salah satu program strategis PSBI." Pungkasnya.

Dalam kesempatan ini Anis juga menitipkan salam untuk para santri dan keluarga besar pondok pesantren yang mewakilannya hadir dalam pertemuan tersebut.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



HARI ASPIRASI



Kunjungan SMPIT Insan Cita Serang

Fraksi PKS DPR RI menerima kunjungan dari Siswa-siswi Kelas IX SMPIT Insan Cita Serang pada Selasa 26 November 2019 di Ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI. Kunjungan ini dalam rangka pengenalan peran dan fungsi DPR serta peranan Fraksi PKS DPR RI dalam dakwah parlemen.



Aspirasi Paguyuban Warga Komplek Margawangi Bandung

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Drs. H. Adang Daradjatun menerima aspirasi dari paguyuban warga kompleks Margawangi, kec buah batu Kota Bandung pada Selasa 26 November 2019 di Ruang Rapat Pimpinan Fraksi PKS DPR RI. Aspirasi tentang keluhan terkait dampak pembangunan Trase kereta cepat Jakarta- Bandung yang berdampak pada kompleks perumahan

HARI ASPIRASI



Audiensi JALA PRT

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS H. Alifuddin, Dr. Netty Prasetyani, dan Dr. Kurniasih Mufidayati menerima audiensi Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (jala PRT). pada Rabu 27 November 2019 di Ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI. Aspirasi terkait tentang Ajuan RUU Perlindungan PRT sebagai Prioritas Prolegnas 2020

Aspirasi PB Perhimpunan dokter hewan Indonesia (PDHI).

Anggota Komisi IV DPR RI drh. Slamet, Dr. Hermanto, SE., MM, dan H. Johan Rosihan, ST menerima aspirasi dari PB Perhimpunan dokter hewan Indonesia (PDHI). pada Rabu 27 November 2019 di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI. Aspirasi tentang RUU Perlindungan kesehatan hewan.

PERINGATAN HARI GURU NASIONAL

Penguatan Pendidikan Adab Lebih Utama Dibanding Ilmu Pengetahuan

Saya minta pemerintah untuk membuktikan, mulai saat ini hingga lima tahun mendatang, ada terobosan pola pendidikan nasional yang mengedepankan inovasi belajar mengajar untuk menjadikan anak-anak didik menjadi visioner sekaligus berakhlak mulia

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (25/11) — Pada Hari Guru 25 November 2019, anggota DPR RI, Nevi Zuairina mengatakan Pendidikan kedepan perlu medahulukan pendidikan adab.

Menurut Nevi, Porsi waktu belajar pembentukan karakter melalui pendidikan adab ini membutuhkan tambahan jam pelajaran sehingga ada kekuatan cara berfikir dan cara bertindak siswa yang memiliki kualitas moral yang tinggi.

"Saat ini yang berlaku pada pendidikan anak-anak kita porsi terbanyak adalah ilmu

pengetahuan yang beragam dalam satu moment siklus belajar. Pelajaran adab di berikan setelahnya atau di sela-sela pelajaran. Padahal pola belajar yang terbukti membangun kualitas sumber daya manusia, dimanapun tempatnya di dunia, pelajaran adab adalah paling utama terutama pada anak usia dini hingga pendidikan dasar", ujar Nevi.

Legislator PKS ini setuju dengan pernyataan Menteri pendidikan yang menggambarkan betapa para guru saat ini disibukkan oleh beban administrasi yang berat. Dan ini menjadi bukti, bahwa Inovasi pendidikan kita tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia.

"Di Hari Guru ini saya minta pemerintah untuk membuktikan, mulai saat ini hingga lima tahun mendatang, ada terobosan pola pendidikan nasional yang mengedepankan inovasi belajar mengajar untuk menjadikan anak-anak didik menjadi visioner sekaligus berakhlak mulia", pinta Nevi.

Politis PKS ini mengatakan, para guru kedepannya dituntut akan

inovasi dalam pola pendidikan nasional, pemerintah harus memberikan fasilitas maupun regulasi yang mendukung kinerjanya. Pola diskusi, bakti sosial, menemukan bakat terpendam di antara murid, dan penguatan kualitas guru semua aturan dan dukungan fasilitas mesti difikirkan oleh pemerintah, bukan saja pada instruksi saja.

"Paling utama adalah pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Saat ini jangankan antar propinsi, dalam satu kota saja terjadi ketimpangan kualitas pendidikan sehingga terjadi perebutan untuk masuk ke sekolah tertentu meski saat ini diminimalisir dengan pola zona. Namun ini adalah fakta bahwa ada situasi tidak meratanya kualitas pendidikan di antara sekolah-sekolah dimulai dari fasilitas gedung, laboratorium, sarana olahraga dan praktik lapang hingga kualitas guru", tutur Nevi.

Legislator
Sum
ate

ra Barat II ini menambahkan, untuk memperkuat institusi sekolah perlu adanya keterbukaan pada tata kelola keuangan sekolah. Karena ini penting untuk sebagai kontrol internal diantara sesama pengelola sekolah maupun guru sehingga penggunaan teknis tidak mengalami kendala apapun. Semua alokasi anggaran, akan terdistribusi secara baik dan aman

nah.

"Saya berharap, pemerintah melalui menteri pendidikan dapat mewujudkan visinya membangun kualitas pendidikan nasional yang adaptif dengan situasi menantang di masa depan. Kita perlu mengingat, bahwa dikepala seorang guru, ada sebuah mahkota yang tidak dimiliki oleh profesi lain dan siap menyinari semua. Artinya, pendidikan, dimulai dari adab hingga ilmu pengetahuan, ada guru sebagai pendidik sekaligus pengajar untuk semua anak didik di Indonesia", demikian Nevi Zuairina.

Foto : dpr.go.id



Harapannya bahwa program ini benar-benar berjalan secara baik dan benar sesuai tujuan mulianya yaitu meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban keluarga, menciptakan kemandirian, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,MA

Anggota Komisi VIII DPR RI

Dalam kunjungan kerja spesifik perdana sebagai anggota DPR RI yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo 23 November 2019 kemarin, bersama sembilan anggota DPR RI lainnya di Komisi VIII didampingi Staf ahli Kementerian Sosial RI meninjau sejauh mana manfaat dan efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan kementerian sosial

Dalam kesempatan ini Nur Azizah Tamhid anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKS mengapresiasi program ini dan mengharapkan di tingkatkan jumlah bantuan dan pengawasan agar dana-dana tersebut tepat sasaran dan penerima bantuan bisa mandiri dan mengembangkan kegiatan usaha yang dilakukan di program tersebut.

DAERAH PEMILIHAN

Fraksi.pks.id | Ahad 24 November 2019

Fraksi PKS DPR RI | Fraksi.pks.id | @fpksdprri | fraksi.pks.id



Legislator Dorong Kemandirian Keluarga Melalui Program PKH

Selain itu terkait data peserta KPM yang juga banyak dikeluhkan warga di lapangan tentunya perlu ada keseriusan dalam seleksi dan validitas agar program tersebut menjadi keberkahan untuk negeri ini.

Harapannya bahwa program ini benar-benar berjalan secara baik dan benar sesuai tujuan mulianya yaitu meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban keluarga, menciptakan kemandirian, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, ibarat memberi "Kail bukan Ikan", sehingga Keluarga Penerima Manfaat atau biasa disingkat KPM secara periodik dapat berkurang sejalan dengan efektifitas manfaat program ini.

Sama artinya bahwa angka kemiskinan di Indonesia juga menurun.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018.

Umlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta

orang terhadap Maret 2018.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.

Bandring September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019), berdasar data BPS Nasional 2019.

Penyerahan sertifikat bagi KPM Graduasi Mandiri menjadi simbol keberhasilan program ini dalam tujuannya mengentaskan kemiskinan, semoga semangat yang sama juga dimiliki semua KPM untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dengan memanfaatkan program-program komplementer KPM ini.



Rentannya Ketahanan Keluarga, Berdampak pada Negara



Tanpa ketahanan keluarga, maka akan terjadi kerentanan keluarga. Ketika keluarga rentan maka masyarakat dan negara pun menjadi rentan

Dr. HJ. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesra

Bandung (23/11) — "Ketahanan keluarga harus menjadi fokus utama," ujar Netty Prasetyani, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, saat memberikan materi dalam Workshop PP Wanita Persatuan Umat Indonesia di kawasan Pasir Impun, Bandung, (23/11).

Dalam workshop bertemakan tantangan Wanita PUI dalam implementasi Islahul Tsamaniyah di era industry 4.0, lebih lanjut Netty mengatakan, peran keluarga di era digital ini sangat penting mengingat perubahan dunia akibat

perkembangan komputer dan internet akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan keseharian kita, termasuk dalam keluarga.

Netty yang menjabat Sekretaris Dewan Pakar Pengurus Pusat Wanita PUI mengingatkan bahwa perkembangan internet memberikan kemudahan pada keluarga untuk berinteraksi. Namun di saat bersamaan, internet dan gadget mengambil peran pengasuhan anak-anak kita.

"Padahal, dalam konteks parenting, kehadiran orang tua adalah keharusan, tidak bisa digantikan oleh robot maupun gadget," tegas Netty.

Oleh karena itu, Netty mewajibkan para orang tua untuk mengasah kemampuan literasi media. Jangan sampai para orang tua tidak meng-upgrade diri dengan perkembangan global yang terjadi.

"Bayangkan, 51,7 persen keluarga di Indonesia dipimpin oleh kepala keluarga lulusan SD atau tidak lulus SD," ulas Netty.

Tanpa bermaksud mendiskreditkan kepala keluarga, kata Netty, kondisi ini menggambarkan bagaimana kemampuan keluarga dalam

memberikan pengasuhan dan menemani tumbuh kembang putra-putrinya yang sangat akrab dengan dunia digital.

"Internet bagai buah simalakama. Di satu sisi banyak memberi kemudahan akses, namun ada banyak hal yang mengancam anak-anak seperti konten pornografi, penjahat seksual anak (pedofil), bullying dan ancaman eksternal lainnya," imbuhnya.

Sebelum mengakhiri, Netty

menitipkan pesan kepada para kader Wanita PUI untuk menjadi garda terdepan dalam melakukan praktik pengasuhan yang baik, dan mempromosikan ketahanan keluarga di Indonesia.

"Tanpa ketahanan keluarga, maka akan terjadi kerentanan keluarga. Ketika keluarga rentan maka masyarakat dan negara pun menjadi rentan," tutup Netty.



Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetyani Foto bersama dalam agenda Workshop PP Wanita Persatuan Umat Indonesia di kawasan Pasir Impun, Bandung, (23/11)..

HNW: Indonesia Harus Makin Serius Membela Palestina

“Ini adalah momen sekaligus pengingat bagi Indonesia, tidak usah ragu membela Palestina secara maksimal. Mayoritas masyarakat dunia berkomitmen membela bangsa Palestina

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, MA.

Wakil Ketua MPR RI

Jakarta (29/11) — Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa Indonesia seharusnya meningkatkan pembelaannya terhadap bangsa Palestina selaku bagian dari masyarakat dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, serta tegaknya hukum internasional.

Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Gedung MPR-RI

Kamis siang (28/11) memaparkan bahwa Hari Solidaritas Palestina Internasional (International Day of Solidarity with Palestinian People) yang jatuh pada tanggal 29 November setiap tahunnya merupakan upaya komunitas internasional, dalam hal ini PBB, untuk mempertahankan komitmen internasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Artinya PBB secara jelas berkomitmen membela hak bangsa Palestina untuk mendirikan negara berdaulat, sekaligus menegaskan bahwa pendudukan dan penjajahan Zionis Israel harus dihentikan,” tegasnya.

Pembelaan terhadap Palestina juga berhubungan erat dengan amanat konstitusi Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat Nur Wahid, bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Pertama mengamanatkan penghapusan seluruh penjajahan di atas dunia, karena tidak sesuai dengan perikeadilan dan perkeadilan.

“Maka komitmen dunia

dalam membela Palestina itu pun juga selaras dengan spirit yang terkandung dalam konstitusi kita,” ujarnya.

Hidayat Nur Wahid yang juga merupakan Anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menegaskan, “Bangsa Palestina telah berjasa mendukung lahirnya Republik Indonesia sebagai negara merdeka. Sudah sepatutnya negara mencurahkan upaya teroptimalnya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina.”

Hidayat Nur Wahid pun mengemukakan sekurang-kurangnya tiga alasan bagi Indonesia untuk membela Palestina. (1) Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, (2) kemudian tanggungjawab Indonesia untuk menjalankan amanat konstitusi yang menentang segala bentuk penjajahan, (3) serta hutang budi historis Republik Indonesia terhadap bangsa Palestina.

Berangkat dari berbagai alasan tersebut, Hidayat Nur Wahid berpandangan bahwa Indonesia dapat meningkatkan pembelaannya bagi bangsa Palestina dengan melakukan perlawanan serius menghadapi tindakan-tindakan sepihak yang diperbuat oleh entitas Zionis Israel dan sekutu-sekutunya sejak 1948 sampai hari ini, seperti klaim terhadap Yerusalem, Golan, dan Lembah Yordan, pembantaian pada awal

bulan November 2019 di Jalur Gaza, serta berlanjutnya pembangunan pemukiman-pemukiman ilegal di Tepi Barat.

Lebih jauh lagi, Hidayat Nur Wahid menyarankan beberapa opsi kepada pemerintah Indonesia maupun masyarakat pada umumnya dalam rangka membela Palestina.

“Realisasikan kebijakan boikot produk Zionis Israel, sebagaimana Presiden Jokowi telah menyetujui hal tersebut pada Konferensi OKI 2016. Pemerintah dapat segera merealisasi kebijakan boikot tersebut dengan mengambil contoh gerakan BDS (Boycott, Divest, Sanction) di Eropa dan AS yang cukup efektif dalam menekan Zionis Israel”, jelasnya.

Hidayat Nur Wahid juga menyinggung tentang posisi Indonesia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB yang seharusnya dapat dipergunakan secara maksimal untuk mendukung Palestina yang menjadi korban pelanggaran-pelanggaran HAM berat oleh Israel, negara yang secara terbuka melakukan tindakan terorisme negara (state terrorism) terhadap Palestina, baik sebagai Bangsa maupun Negara. Apalagi pekan lalu tanggal 19 November 2019, Majelis Umum PBB menegaskan kembali hak bangsa Palestina untuk merd

eka, berdaulat, dan menentukan kehendak sendiri, dalam rancangan Resolusi A/C.3/74/L.58 yang disetujui oleh 166 negara anggota PBB.

“Ini adalah momentum sekaligus pengingat bagi Indonesia, tidak usah ragu membela Palestina secara maksimal. Mayoritas masyarakat dunia berkomitmen membela bangsa Palestina. Jangan sampai Indonesia terlampaui oleh negara lainnya, padahal Indonesia mampu berbuat lebih banyak untuk Palestina”, terangnya.

Foto : dpr.go.id





Tetap Konsen dengan Isu Kemanusiaan

Anggota BKSAP DPR RI Iskan Qolba Lubis bersama Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI melakukan kordinasi dengan Wakil Menteri Luar Negeri membahas Kerjasama Bilateral dengan Perlemen Negara Sahabat dengan program diantaranya, Penguatan diplomasi ekonomi, Diplomasi

perlindungan, Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan Kontribusi Indonesia dalam percaturan Global, Infrastruktur dan Digitalisasi Diplomasi. Secara khusus PKS tetap konsen terhadap isu pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di belahan dunia seperti Palestina, Uighur dan Rohingya.

Komisi V DPR Tinjau Infrastruktur Sumsel



Anggota Komisi V Ahmad Syaikhul dan Sigit Sosiantomo bersama Tim Kunspek Komisi V DPR RI menggelar pertemuan dengan

Gubernur Sumatera Selatan beserta Bupati dan Wali Kota di Sumatera Selatan, membahas pembangunan Infrastruktur di Sumatera Selatan dari pembangunan Jalan Tol, Bendungan dan Jembatan, Kamis, (21/11) Dalam pertemuan tersebut Komisi V DPR RI juga mendapatkan temuan dampak dari pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) Palembang, seperti ditemukannya 22 tiang LRT yang menutup gorong-gorong, sehingga ketika musim hujan terjadi banjir akibat saluran air yang tidak lancar.

Kunspek Komisi III ke Kalteng



Anggota Fraksi PKS Adang Daradjatun Tim Kunspek Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menggelar rapat dengan Kapolda dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah guna melakukan pengawasan pelaksanaan tupoksi dan kewenangan dari sistem penegakan hukum, terutama dalam mencegah maupun melakukan penyelamatan di sektor penerimaan negara dalam hal ini bidang Sumber Daya Alam, Jumat, 29 November 2019.

BKSAP Day di Unsri Palembang



Wakil Ketua Mardani Ali Sera hadir dalam BKSAP DPR RI bekerja sama dengan Jurusan Hubungan Internasional, FISIP Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan menyelenggarakan BKSAP Day dengan tema "DPR RI dan Peran Strategis Diplomasi Parlemen Indonesia", Jumat, 29 November 2019.

Bertemu Parlemen Belgia



Anggota DPR RI Ledia Hanita hadir dalam pertemuan Delegasi DPR RI dengan Wakil Presiden Parlemen Belgia Andre Flahaut dan Ketua Persahabatan Parlemen Belgia-Indonesia Ozlem Ozen membahas Hubungan Ekonomi Indonesia dan Belgia, Perkembangan Perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Investasi Belgia di Indonesia dan Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Indonesia, Kamis, 28 November 2019.

Kunjungi Kawasan Industri Modern Cikande



Rafli bersama Komisi VI DPR menggelar pertemuan dengan Manajemen PT. Industrial

Modern Estate, Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Perindustrian membahas industri halal yang sudah mulai diterapkan di Kawasan Industri Modern Cikande di Cikande, Serang, Banten, Kamis, 28 November 2019.

Banggar ke Sumsel



Anggota FPKS Nasir Djail, Ecky Awal Mucharam dan Sukamta bersama Tim Kunker Banggar DPR RI menggelar pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Ditjen Bea Cukai Kanwil Sumatera Selatan dalam rangka menghimpun masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan pajak dan bea cukai di Kantor DJP Provinsi Sumatera Selatan, Kamis, 28 November 2019.

DPR bertemu UNTAC



Sekretaris Fraksi PKS Ledia Hanifa bersama delegasi DPR RI menggelar pertemuan dengan Sekretaris Jenderal United Nations Conference and Trade and Development (UNCTAD), Mukhisa Kituyi, Selasa, 26 November 2019

Kunker BAKN ke DIY



Ahmad Syaikhulmuhammad bersama Tim Kunker BAKN DPR RI melakukan kunjungan ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penela'ahan hasil pemeriksaan semester 1 BPK tahun 2019 terhadap Dana Otonomi Khusus Provinsi DIY.

RDP dengan BPiP



Anggota Komisi II Mardani Ali Sera hadir dalam RDP Komisi II DPR RI dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPiP) membahas Rencana Strategis BPiP, Senin, 25 November 2019.

Pantau PSBI



Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly bersama Tim Kunspek Komisi XI melakukan kunjungan ke Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dalam rangka memantau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), Jumat, 22 November 2019.

Apresiasi untuk PSBI



Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam bersama Tim Kunspek Komisi XI DPR RI menggelar pertemuan dengan Bank Indonesia di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, di Bandung, Jumat, 22 November 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi XI DPR RI mengapresiasi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang telah menyalurkan bantuan sosial dengan langkah yang tepat sehingga adanya program tersebut dapat menumbuhkembangkan ekonomi serta mengurangi angka inflasi di Jawa Barat itu sendiri.

Serap Prolegnas



Anggota Baleg DPR RI Adang Daradjatun bersama Tim Kunker Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar pertemuan dengan Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kanwil KemenkumHAM,

Civitas Akademika Universitas Airlangga, Universitas Surabaya, Universitas Naretama Surabaya, Universitas Bhayangkara Surabaya, LSM dan Tokoh Masyarakat, dalam rangka penyerapan aspirasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2020, Kamis, 21 November 2019.

Gali Masukan Prolegnas Di DIY



Anggota Baleg DPR RI KH Buckhori Yusuf bersama Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Muztadz dan didampingi Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menggelar pertemuan dengan Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta, Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada, Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia, LSM dan Tokoh Masyarakat guna menyerap aspirasi untuk penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, 21 November 2019. #KunkerDPR

Sosialisasi 4 Pilar di Kebayoran Lama



Anggota MPR RI Kurniasih Mufidati mengadakan Sosialisasi Empat Pilar di Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada Rabu Malam 27 November 2019. Dalam paparannya Mufida menyatakan bahwa Tantangan kehidupan berbangsa kian berat. Karena itu, penguatan pemahaman dan internalisasi atas nilai2 Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika wajib dilakukan semua elemen bangsa.

Ajak Ortu Serius Mendidik Anak



Anggota Fraksi PKS DPR RI Nur Azizah Tamhid Hadir dalam Agenda reses anggota DPRD Kota Depok Suparyono di TK Islam Harapan Bahagia Sukmajaya Depok pada Selasa 26 November 2019, Dalam sambutannya Nur Azizah mengapresiasi dan mengajak para hadirin pada kesungguhan peran para orang tua sebagai pendidik yang pencetak kader unggul pengukir sejarah bangsa di masa depan yang akan menghantarakan kebanggaan dan kehormatan.

RDP Komisi IX



Komisi IX DPR RDP dan RDPU dengan Sesjen Kemenkes, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi), Ketua International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG), Ketua Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB) Indonesia, terkait: (1) Evaluasi tata kelola obat dan alat kesehatan untuk program JKN tahun 2018-2019. (2) Penyelenggaraan tata kelola obat dan alat kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan tahun 2020-2021. (3) Masalah dari penyedia obat dan alat kesehatan guna perbaikan sistem tata kelola obat dan alat kesehatan untuk program JKN, Rabu, 27 November 2019

PROFIL**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Jangan lesu dan pesimis, harus tetap semangat. "Sabisa-bisa kudu bisa...." demikian sebuah motto terlempar dari Gubernur asal PKS Ahmad Heryawan. Sosok yang pernah jadi Kepala Daerah dengan "Segudang" Prestasi.

Semua capaian fenomenal seorang Aher tidak hadir dari ruang hampa, sudah pasti ada dukungan keluarga dan istri. Sebuah pepatah anonim berbunyi "Dibalik Pria Sukses, Ada Wanita Hebat Dibelakangnya". Bagi kang Aher tentu saja wanita disampingnya bernama DR. Hj. Netty Prasetyani, SS, MSI Netty Prasetyani. Sosok perempuan yang 3 C: cantik,

care dan cerdas. Beliau lahir di Jakarta, 15 Oktober 1969. Merupakan ibu dari 6 anak, sudah punya 2 menantu dengan 1 cucu dan insya Allah calon cucu kedua sedang dinanti. Kita doakan sehat dan lancar proses persalinannya. Amiin.

Netty merupakan Anggota Fraksi PKS DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII. Lolos ke senayan berbekal sejumlah capaian yang luar biasa, baik dibidang sosial maupun pemerintahan.

Netty memiliki kesungguhan dan keseriusan untuk konsisten memperjuangkan isu-isu perbaikan kesehatan, pendidikan,

perlindungan wanita dan kesejahteraan masyarakat. Meski sibuk, keluarga yang pertama dan utama.

Kuy ah, kita lihat dan tiru #keluargaPKS termasuk keluarga yang dibangun oleh Netty dan Aher. Mereka memegang prinsip bahwa anak adalah output pengasuhan yang menjadi anak panah peradaban. Jangan pernah mengabaikan urusan ini karena orang tua harus melesatkannya menjadi kontributor kemajuan bangsa.

Sering kali #keluargaPKS Bu Netty selalu bilang, jangan pernah membangun gedung bertingkat dan meninggalkan gubuk derita di dalam rumah. Yang beliau maksud, kesuksesan di ruang publik atau lingkungan kerja, tak akan berarti apapun jika kita mengabaikan rumah dan keluarga. Nyess banget kan

Kunjungi Kanal Sosial Media Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si

Instagram:
Netty_heryawan

Twitter:
Netty_heryawanFP

Facebook:
Netty Prasetyani Heryawan

Anak adalah **KONTRIBUTOR** Kemajuan Bangsa



”
Jangan lesu dan pesimis, harus tetap semangat.





Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI

fraksi.pks.id